

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Padi merupakan produk pertanian berupa tanaman asli Negara-negara asia termasuk juga Indonesia. Selain itu sebagian besar masyarakat Indonesia percaya, bahwa padi adalah anugerah dari Yang Maha Pencipta sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.¹

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar masyarakatnya bertopang pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Akan tetapi, petani Indonesia bukanlah merupakan mereka yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Mereka merupakan orang-orang yang masih miskin dan terpinggirkan. Mereka sering dirugikan oleh masalah kebijakan perberasan yang dilakukan oleh pemerintah. Belum lagi masalah sosial ekonomi lain yang mereka hadapi sebagai petani. Permasalahan beras dan petani menjadi sebuah ironi bagi Negeri ini. Sebuah ironi karena Negara ini merupakan Negara peghasil beras, akan tetapi melakukan impor beras dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada umumnya sebagian masyarakat menganggap bahwa impor beras dipicu oleh produksi atau suplai beras dalam negeri yang tidak mencukupi. Akan tetapi, pada kenyataannya impor beras dilakukan ketika data statistik menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus beras. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Angka Ramalan II (ARAM II) memperkirakan produksi padi pada tahun 2011 mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 2,4 persen dibandingkan tahun 2010. Jika dikonversi ke beras, artinya pada tahun ini produksi beras nasional sebesar 38,2 juta ton.² Apabila dibandingkan dengan konsumsi beras Indonesia

¹ BALITPA(Balai Penelitian),kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand,(Balai Penelitian Padi),Inovasi Teknologi Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani, Sukamandi : Badan Litbang Pertanian,157

² Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. BPS. 2011

sebanyak 34 juta ton per tahun, Indonesia sedang mengalami surplus beras sebanyak kurang lebih 4 juta ton beras.³

Produksi pertanian padi di Indonesia selalu mengalami pasang surut. Pada pemerintah Orde Baru (Orba), stabilitas ekonomi makro, khususnya inflasi menjadi inti pembangunan ekonomi. Harga beras berperan besar dalam penentuan tingkat inflasi, sehingga harga beras dikendalikan untuk tujuan menstabilkan harga umum. Pemerintah memberikan hak monopoli impor beras kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), guna menstabilkan harga beras dalam negeri.

Pada masa awal hingga pertengahan orba, yakni Antara periode 1970-1980an, produksi beras di Indonesia cukup bagus, bahkan tahun 1984 mengalami swasembada beras. Kondisi ini terjadi kerana kinerja pemerintah yang sinergis dengan berbagai pihak seperti produsen padi, distribusi padi dan konsumen beras, sehingga distribusi beras dari hulu ke hilir menjadi sistematis.⁴

Kondisi itu juga ditopang dengan kebijakan makro Soeharto yang menjadikan pembangunan dalam bidang pertanian sebagai prioritas utama dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Ia berpandangan bahwa dengan semakin membaiknya pembangunan di bidang pertanian, dihadapkan dapat diikuti dengan semakin baiknya ketahanan pangan di Indonesia.

Ketersediaan pangan yang cukup juga akan mendukung terciptanya ketahanan pangan yang baik. Sementara ketahanan pangan yang baik merupakan modal utama untuk mewujudkan sebuah stabilitas dan ketahanan Negara-negara yang baik pula.⁵

³ https://www.kompasiana.com/kanopi_feui/kebijakan-impor-beras-di-indonesia_55097936a333116f702e3a38
diakses pada 25 Semtember 2017

⁴ Beddu Amang, dkk. 1999, "kebijakan beras dan Pangan Nasional. Jakarta: IPB Press, 159

⁵ Beddu Amang, dkk. , "kebijakan beras dan Pangan Nasional. Jakarta: 1999, IPB Press, 25

Dalam sebuah pidato kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 1988, Soeharto mengatakan dalam “Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1983, bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor, pendapatan petani memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan kesempatan usaha”.

Kerjasama yang sinergis, baik di tataran grass root, pemangku kebijakan, bahkan hingga dukungan presiden yang cukup besar menjadi salah satu dari tiga alasan suksesnya Indonesia meraih kondisi swasembada beras dalam rentang waktu yang cukup lama.

Sejak tahun 1990, kondisi berubah dan memaksa pemerintah untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia harus melakukan impor beras. Alasan dilakukannya impor adalah bahwa produksi beras dalam negeri tidak mampu mengejar laju pertumbuhan permintaan beras dalam negeri, seiring dengan penambahan penduduk, dan juga banyak faktor lain termasuk harga beras dari luar yang lebih murah dan berkualitas.

Salah satu kejadian yang cukup remarkable sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia tidak lagi swasembada dan bahkan harus melakukan impor adalah adanya peristiwa ketika IPTN menukar dua pesawat CN-235 senilai 34 juta dolar AS ditukar dengan beras ketan dari Thailand.⁶

Hal tersebut sesuai dengan fakta yang dipaparkan oleh Food Agriculture Organization (FAO) yang menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan di Negara-negara berkembang hanya bertambah 1% pertahun, ini berbanding jauh dengan perkembangan penduduk yang menyentuh hingga 4% pertahun. Kondisi ini tentu berpengaruh besar

⁶ Tersedia di situs resmi www.library.ohiou, diakses pada tanggal 25 Juni 2017, pukul 20.25 WIB

terhadap supply-demand jenis komoditi ini.⁷

Tahun 1996 kemudian menjadi salah satu titik tersuram dalam persoalan agrikultur di Indonesia khususnya dalam masalah beras. Hal ini sejalan dengan semakin lesunya sistem perekonomian negara baik yang makro maupun yang mikro. Banyak sektor keuangan dan sektor riil yang tutup, terutama sektor perbankan dan konstruksi. Tingkat pengangguran tiba-tiba bertambah, serta harga barang sulit dikontrol, termasuk harga pangan dan harga beras khususnya.

Memasuki tahun berikutnya, kondisi itu semakin memburuk dengan terjadinya krisis moneter yang membawa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika melemah hingga menyentuh Rp.14.000 per dolar dari yang sebelumnya yaitu Rp.2.800.⁸ Krisis yang bermula dari Thailand ini juga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis yang lain seperti sosial dan politik hingga mengantarkan Indonesia ke masa Reformasi seperti saat ini.

Pada tahun 1998, terdapat kebijakan tariff impor nol persen. Kebijakan ini dilakukan karena kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan keadaan iklim yang tidak mendukung produksi gabah.⁹

Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan proteksi terhadap pertanian padi nasional. Kebijakan tariff nol persen pun dihapuskan. Hal ini dikarenakan impor beras dari Negara asing makin membanjiri pasar domestik Indonesia semenjak diberlakukannya Perjanjian Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement of Agriculture, World Trade Organization) pada tahun 1995. Akhirnya kebijakan proteksi berupa tariff ad-valorem sebesar 30 persen ditetapkan. Selain kebijakan tariff, terdapat juga kebijakan proteksi non-tariff. Pada saat itu, kedua kebijakan proteksi, yaitu tariff dan non tariff berjalan sangat efektif. Petani lokal sangat terlindungi serta harga beras cenderung

⁷ Sinar Harapan, 21 November 1972.

⁸ <http://www.oanda.com/convertfxhistory>, diakses pada 25 Juli 2017, pukul 19.20 WIB

⁹ Irawan, Andi. Integrasi Pasar Beras Indonesia.

stabil.¹⁰ Akan tetapi, kebijakan proteksi seperti ini sudah tidak relevan lagi jika diterapkan sekarang. Saat ini kebijakan tersebut memang sudah tidak populer dan sudah sangat jarang dipakai oleh Negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan globalisasi yang semakin memaksa Negara-negara untuk terbuka terhadap Negara lain. Walaupun Negara Indonesia menerapkan tariff terhadap impor beras, tariff itu sangatlah rendah sehingga harga beras impor menjadi lebih murah dari beras lokal. Dengan kualitas beras impor yang berada di atas kualitas beras lokal, beras lokal pun menjadi kalah saing dengan beras impor.

Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Negara tetangga, Thailand. Pada pertengahan pada tahun 2000-an, Thailand bahkan telah mampu mengatasi krisis, dan mengalami berbagai perkembangan pesat dalam proses pemulihan ekonominya. Pemerintah Thailand tidak pernah lagi menarik dana kepada IMF sejak Juni 1999.¹¹

Keberhasilan Thailand memulihkan perekonomiannya didukung oleh berbagai faktor, termasuk penguatan pangan, produktivitas pertanian (terutama beras) serta peningkatan volume ekspor beras ke Negara-negara lain.¹²

Thailand merupakan salah satu Negara pengekspor beras terbesar di dunia, sementara Indonesia merupakan Negara pengimpor beras. Berdasarkan data, harga produksi rata-rata gabah atau beras Antara Indonesia dan Thailand tidak terlalu berbeda jauh sekitar 100 US Dollar per ton. Namun harga beras di pasaran Antara Thailand dan Indonesia cukup berbeda jauh.

Harga beras di Indonesia sampai awal tahun 2004 berkisar Antara Rp.2.750,00-Rp.3.000, 00. Harga beras di Thailand pada tahun 2004 lebih murah dibandingkan itu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya pada skala produksi,

¹⁰ Kebijakan Proteksi Beras Indonesia 2009.

¹¹ Tri Andrianto, Pengaruh Letter of intent (LOI) IMF Terhadap Pelemahan Pangan Indonesia, 1995-2009, 63.

¹² Ibid, hal 63.

namun juga terdapat pada rantai distribusi beras tersebut dapat sampai pada konsumen.¹³

Periode 2009-2012 merupakan periode yang sangat menegangkan dalam perpolitikan Thailand, namun tidak dengan ekonominya. Pada 2008, Thailand menjadi eksportir beras terbesar di dunia akibat beberapa Negara pengeksport beras seperti India, Vietnam dan China menghentikan kegiatan ekspor beras mereka karena kasus bencana alam dan kekurangan pangan yang terjadi di negara-negara tersebut.¹⁴

Sebagai anggota dalam organisasi regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia dan Thailand juga melakukan kerjasama untuk saling bantu dan mendukung kebutuhan Negara masing-masing. Sayangnya kebijakan pemerintah Thailand pada 2008 justru telah menghancurkan pasaran beras dunia, karena menjual beras Thailand dengan harga yang sangat murah.

Pada tahun 2010-2012, Thailand justru telah menaikkan harga berasnya, hingga lebih mahal dari harga beras lokal Indonesia. Meski demikian, Indonesia tetap mengimpor beras dari Thailand yang terbilang lebih mahal dari harga beras di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, yang menyatakan bahwa produksi beras nasional selalu surplus. Namun, setelah 2008 hingga 2012, impor beras tersebut dilakukan.¹⁵

Dengan adanya fakta di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut “Kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand Periode 2010-2012”.

Hal yang menarik minat penulis dalam mengangkat permasalahan ini, selain Thailand yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia, juga karena impor beras pada tahun 2010-2012 menjadi polemic. Karena dalam data BPS, Indonesia sedang mengalami peningkatan produksi padi, tetapi tetap melakukan impor beras dalam jumlah yang cukup banyak, dan diantara yang terbanyak berasal dari Thailand.

¹³ Tersedia di www.analisadaily.com, diakses pada 23 Agustus 2017, pukul 15.00 WIB.

¹⁴ Tersedia di www.bbc.co.uk, diakses pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 22.05 WIB.

¹⁵ Dokumen Indikator Perekonomian, BPS & Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, 2012, 19.

B. Rumusan masalah

“Mengapa Indonesia Melaksanakan Kebijakan Impor Beras dari Thailand Pada Periode 2010-2012?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui kebijakan impor beras Thailand oleh Indonesia pada tahun 2010-2012. Dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kerjasama Indonesia-Thailand dalam masalah impor beras pada tahun 2010-2012.

2. Manfaat Penelitian adalah

Menjadikan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis dalam menambah pengetahuan serta wawasan berfikir mengenai kebijakan liberalisasi pangan di Indonesia.

Hasil Penelitian ini di harapkan menjadi satu masukan yang berguna bagi pemerintah dalam mengevaluasi Kebijakan Liberalisasi Pangan Indonesia, Khususnya dalam masalah impor beras yang berdampak pada petani.

Bagi Civitas Akademika, hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan dan perbandingan dengan berbagai tulisan lain dalam Ilmu Hubungan Internasional mengenai Faktor-faktor yang melatarbelakangi kerjasama Indonesia-Thailand dalam masalah impor beras pada tahun 2010-2012.

D. Kerangka Pemikiran

Guna menganalisa pertanyaan penelitian di atas, Penulis menggunakan Teori yang digunakan di judul **Kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand Periode 2010-2012** adalah

1. Teori Kebijakan Luar Negeri digunakan untuk menjelaskan dinamika kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, berikut strategi yang digunakan, hingga kemudian mengerucut pada alasan kebijakan tersebut diimplementasikan.

2. Kepentingan Nasional dan. Digunakan untuk menjelaskan dan memetakan secara sistematis dinamika domestik Indonesia dari berbagai sisi seperti sosial, ekonomi dan budaya, yang kemudian berakumulasi menjadi kepentingan nasional.

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut Joshua Goldstein mengatakan bahwa pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional¹⁶. Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan¹⁷.

Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta *benefit* untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Menurut Rosenau tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu

¹⁶ Joshua Goldstein, *International Relations*, (New York: Longman 1999), 147.

¹⁷ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*. (New Jersey: Prentice-Hall, 1983) 107.

dan aspirasi untuk masa yang akan datang¹⁸. KJ. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut:

1. Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.
2. Unsur Waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.¹⁹

Menurut KJ. Holsti, dua tujuan yang lebih dominan dalam negara adalah, tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu, indikator ini dinilai berdasarkan industri, teknologi, bantuan dana dan, militer²⁰. Sedangkan Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideology terakhir dalam sistem internasional, ideologi tersebut merupakan aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional.²¹ Bagi Rosenau tujuan jangka panjang adalah untuk perdamaian, kekuasaan dan keamanan.²²

Setiap Negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Kepentingan tersebut dilaksanakan dengan melakukan interaksi dengan Negara ataupun aktor lain dalam politik internasional. Rumusan kepentingan nasional serta tujuan bersama suatu Negara diformulasikan ke dalam kebijakan luar negeri.

¹⁸ James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969), 167.

¹⁹ K. J. Holsti. *Op. Cit.*, 145.

²⁰ *Ibid.*, 146

²¹ *Ibid.*, 147

²² James N. Rosenau. *Op. Cit.*, 167.

Setiap Negara dan setiap periode pemerintah Negara memiliki rumusan kebijakan luar negeri yang berbeda, tergantung pada situasi ataupun kondisi domestik maupun internasional yang sedang terjadi. Berikut definisi kebijakan luar negeri menurut beberapa ilmuwan.

Howard lentner mendefinisikan kebijakan luar negeri setidaknya harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu, Penentuan tujuan yang hendak dicapai (*Selection of objectives*) pengeralahan sumberdaya atau instrument untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilizations of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) dari kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara actual menggunakan sumber daya yang ditetapkan.²³

Dalam kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand, terdapat pula tujuan yang hendak dicapai kedua Negara yang tentunya sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia sebagai importir maupun Thailand sebagai eksportir. Hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kerjasama berupa kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand pada tahun 2010-2012.

2. **Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Kepentingan nasional dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu Negara maupun pada sistem nilai pedoman perilaku Negara ataupun sistem nilai sebagai pedoman perilaku Negara. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan.

Namun bisa juga terjadi interplay Antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal baik dan saling mempengaruhi Antara pertimbangan-pertimbangan

²³ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori & Praktik*, 2008, Yogyakarta: Graha Ilmu,9.

ideologi dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan tercipta formulasi Kebijakan politik luar negeri yang lain atau baru.²⁴

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton²⁵, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Miroslav Nicnic mempersyaratkan setidaknya ada tiga kriteria yang disebutnya sebagai asumsi dasar, yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Dan terakhir, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintah sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi Negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional suatu Negara yaitu mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain.²⁷

Untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya demi menjaga kedaulatan pangan nya dengan impor beras dari Thailand. Hal ini pun berimbas kepada petani dalam negeri, karena adanya beras impor, maka

²⁴ Sumpena Prawira Saputra, Politik luar Negeri Indonesia , Remaja Kerja Offset, Jakarta: 1985,24.

²⁵ Jack C. Plono, Roy Olton, *The Internasional Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, England : lio Press Ltd, England, 1982, 7.

²⁶ Miroslav Nicnic. 1992. *Democracy and Foreign Policy, The Falacy of Political Realism*, New York : Columbia University Press, 157

²⁷ Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi, (Jakarta LP3ES,1990),140.

petani kurang dapat bersaing, selain kualitas beras dalam negeri kualitasnya kurang bagus, harga beras impor lebih murah, maka dampak negatif yang dirasakan petani sangat besar.

Hal ini tentu akan menjadi kajian yang menarik mengenai apakah kepentingan nasional Indonesia dalam permasalahan ini telah tercapai atau belum tercapai.

Dalam permasalahan impor beras, sebaiknya Indonesia melihat segi kepentingan Kedaulatan ekonomi petani lokal. Dalam hal ini mengutamakan nasib para petani yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan kebijakan impor beras sangat merugikan para petani Indonesia, karena harga beras lokal jatuh dibawah harga beras Negara lain yaitu beras Thailand dan juga Vietnam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menjelaskan sebuah kejadian agar dapat bersifat ilmiah.²⁸ Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data dengan penekanan-penekanan kepada kesesuaian Antara data fakta.²⁹

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian seperti asumsi/dugaan, nilai, dan pendapat dari peneliti sehingga menjadi jelas dalam hasil akhir suatu penelitian.³⁰ Dengan demikian, penulis dapat melakukan analisa atas data-data kualitatif dengan menggunakan, teori serta kerangka pemikiran agar dapat mengelaborasi permasalahan tersebut secara lebih jelas.

Dalam proses pengumpulan data penelitian, terdapat tiga langkah dalam

²⁸ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approach, Edisi Keempat, Massachusetts : Allyn and Bacon, 2000, 63.*

²⁹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana, 2007, 175.*

³⁰ J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches, London: SAGE Publications, 1994, 134.*

mengumpulkan data penelitian. Pertama, adanya pengaturan tentang pembatasan dalam melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen dan bahan visual. Ketiga, membuat suatu protokol untuk mencatat atau merekam setiap informasi.³¹

Oleh karena itu, penulis memberikan batasan masalah pada faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand pada tahun 2010-2012. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai konsep kedaulatan pangan Indonesia dengan fokusnya mengenai kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand pada tahun 2010-2012.

Penelitian ini juga berupaya menganalisa bagaimana diplomasi ekonomi yang ditawarkan oleh Thailand, sehingga Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor beras dalam jumlah yang tidak sedikit, kendati pada faktanya suplay beras dalam negeri memiliki ketersediaan yang cukup.

Terkait teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kajian literatur serta studi pustaka terhadap data-data dengan menggunakan sumber baik berupa jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lainnya. Selain itu juga, penulis menghimpun data kuantitatif yang sesuai dengan pembahasan dan dapat mendukung argument/penulisan skripsi ini.

Selain itu, dalam pengumpulan data, penulis juga melakukan internet research atau penggunaan data-data yang diperoleh dari situs (website) internet. Numun penulis hanya menggunakan data dari situs yang dianggap relevan dan otoritatif sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh melalui internet research ini bersifat sebagai data tambahan/pendukung.

³¹ J.W. Creswell, *Research Desing: Qualitative & Qualitative Approaches*, 135.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM INDONESIA DAN KEBIJAKAN IMPOR BERAS INDONESIA TAHUN 2010-2012. Menjelaskan tentang Kondisi Geografis di Indonesia, Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Indonesi dan Kebijakan Impor Beras dari Thailand tahun 2010-2012, Hubungan Bilateral Thailand-Indonesia, Kebijakan Impor sebagai Instrumen Pengamanan dan Ketentuan World Trade Organization.

BAB III; FAKTOR-FAKTOR INDONESIA MELAKUKAN IMPOR BERAS DARI THAILAND PERIODE 2010-2012, Menjelaskan tetang Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

BAB IV : PENUTUP bab ini yang terakhir dengan Kesimpulan dan Saran

